



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Project Financing Matchmaking Selection and Integrated Funding-Financing

Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

KemenkeuTepercaya



Project Financing Matchmaking Selection

The Government of Indonesia estimates infrastructure gap at IDR 2,877 trillion* making it necessary to tap alternate funding sources

The National Development Planning Agency (BAPPENAS), estimates that Indonesia faces a infrastructure financing gap of IDR 2,877 trillion in key sectors shown below. This gap translates to over 20% of national GDP.



Indonesia has funded its infrastructure needs through:

Budgetary allocations

Municipal Loan

Public Private Partnerships

- Budgetary allocations (DAK) alone are not sufficient to fund infrastructure; this will lead to increase in the fiscal deficit as it is a not a sustainable means of creating and operating public goods/services. These allocations are determined at national level.
- The PPP model has been successful in bringing in private capital and efficiencies into infrastructure e.g. in the road sector, however this method of financing is optimal for commercially viable projects.

* Source: National Development Planning Agency Infrastructure Project plans in Indonesia, 2017

Financing framework necessary for optimal capital allocation to fund

Sub National Government have the following four options to raise funds to develop infrastructure.

- 1 Private sector capital and capabilities through PPP
- 2 DAK (Special Allocation Fund) from the national budget, budgetary surplus
- 3 Municipal Loan
- 4 Municipal bonds raised from capital market

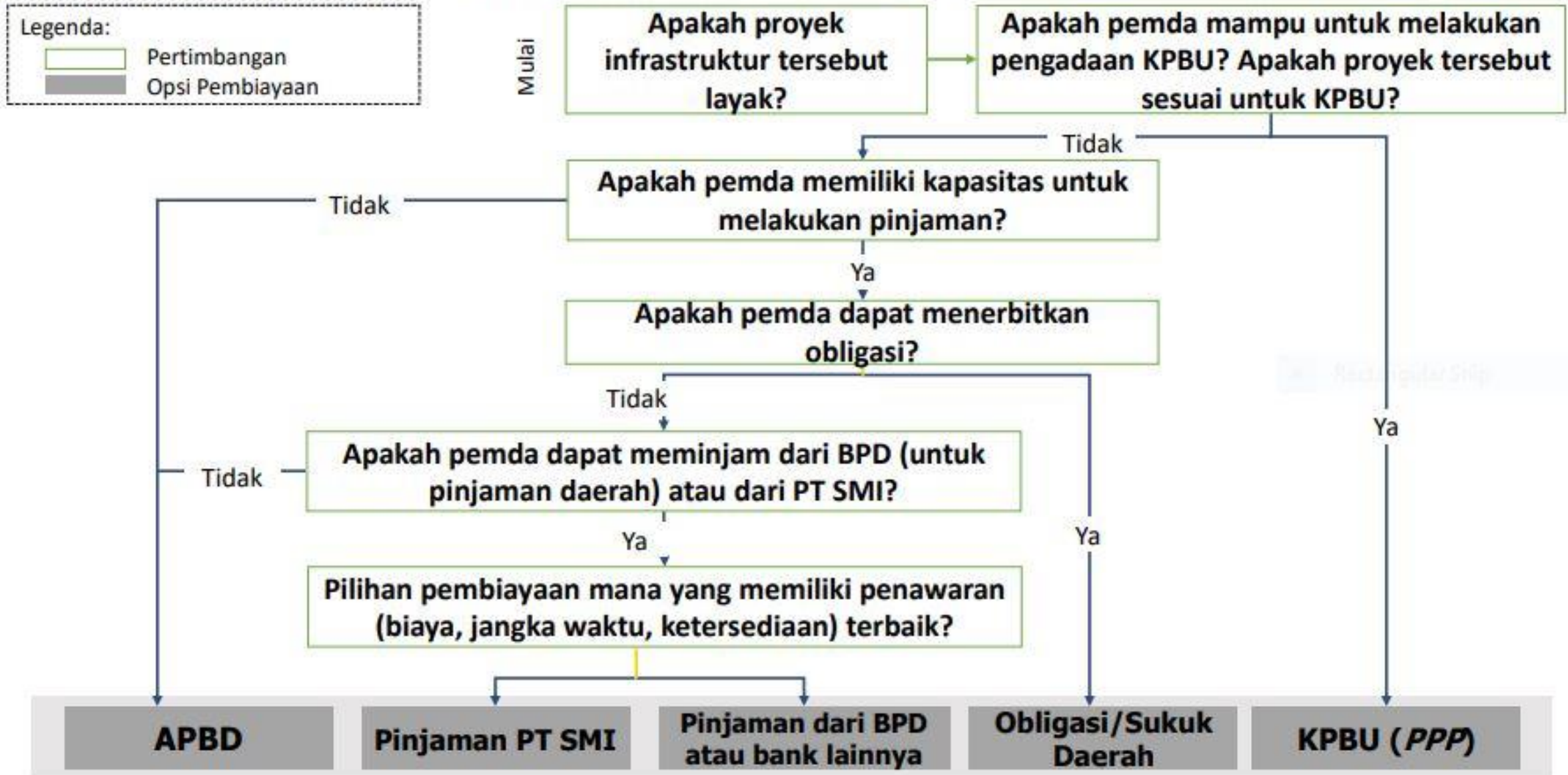
Each of the sources of funds has unique characteristics and have differing impact on:

1. Fiscal health of the provincial government
2. Cost of capital of the infrastructure project

The objective of the framework is to maximize infrastructure development, by matching these avenues of funding to project risks and fiscal capacity of the province.

KERANGKA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH

Pemerintah daerah perlu mengembangkan opsi-opsi pendanaan yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur daerah dengan mengadopsi pendekatan portofolio



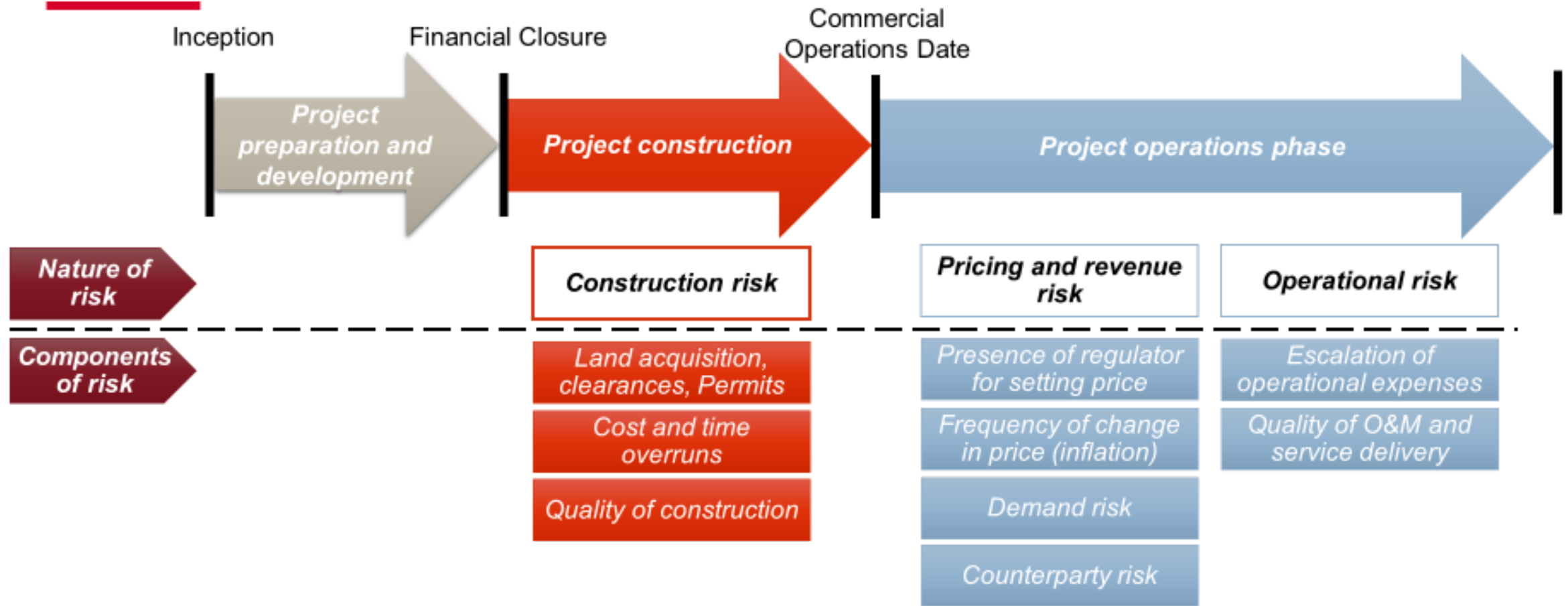
JENIS DAN KARAKTERISTIK INSTRUMEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH

	Kriteria kesesuaian				
	Tenor	Tingkat Suku Bunga	Risiko nilai tukar	Profil risiko	Ketersediaan
APBN/APBD	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Terbatas
PT SMI	3-8 tahun	5 s.d 8% (sesuai dengan tenor)	Utang dalam Rupiah	pemotongan transfer ke pemda debitur bila terjadi gagal bayar	SMI memiliki dana yang cukup untuk jangka menengah
Obligasi Daerah	5-15 tahun*	Sekitar 7% (AA-) (tergantung rating)	Utang dalam Rupiah	Tidak ada jaminan pemerintah	Potensi besar
Pinjaman Daerah melalui BPD	<10 tahun*	<=12%*	Utang dalam Rupiah	Tidak ada jaminan pemerintah;	Pagu pinjaman relatif kecil
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	10-30 tahun	16-18%*	Pembiayaan dapat berasal dari mata uang lain	Tergantung alokasi risiko	Potensi besar dan tergantung pada ketersediaan proyek yang layak dan sesuai.

Dalam APBD
Di Luar APBD

Sumber: Prospera

Project risk framework*



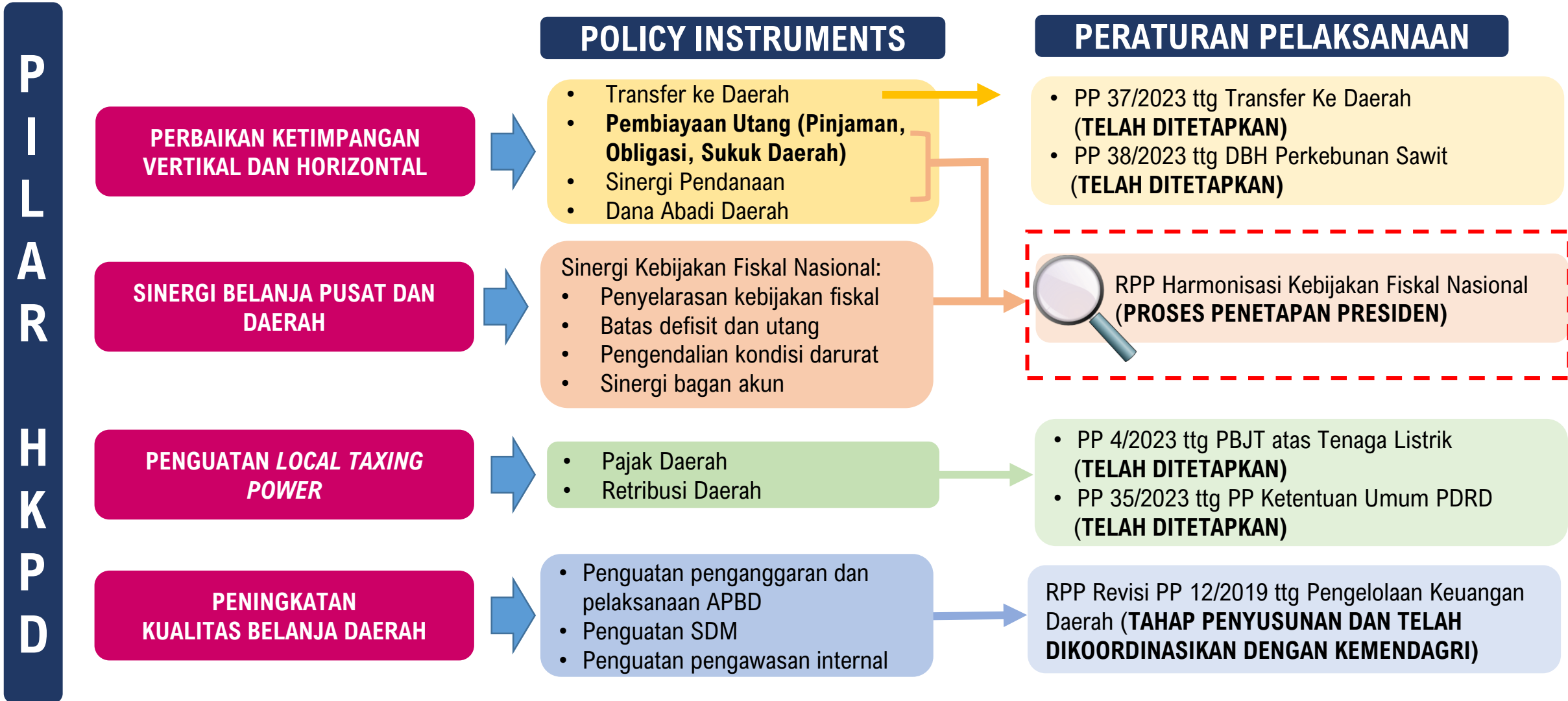


*Integrated
Funding and Financing
(Sinergi Pendanaan)*



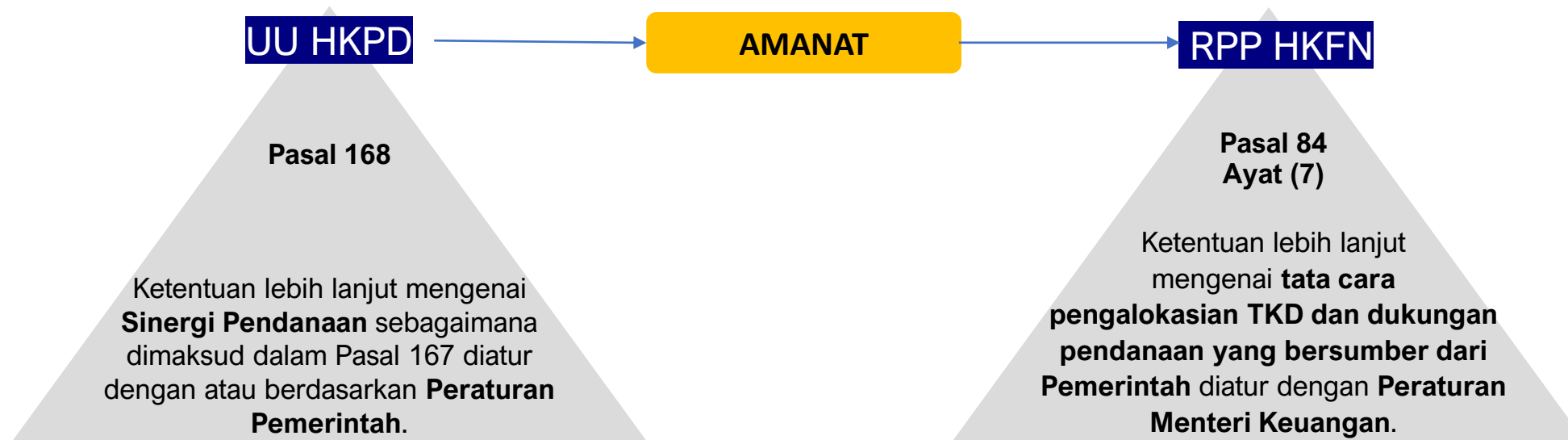
OVERVIEW PERATURAN PELAKSANAAN UU HKPD

Atas 21 amanat PP dalam UU HKPD, dilakukan simplifikasi dan integrasi menjadi 6 PP :



Sinergi Pendanaan

- 1** Pemerintah Daerah dapat melakukan Sinergi Pendanaan dalam rangka percepatan penyediaan Infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai dengan kewenangan Daerah. *(Pasal 167 Ayat 1 UU HKPD)*
- 2** Sinergi Pendanaan dapat dilaksanakan melalui sumber pendanaan **APBD** (PAD, TKD, Pembiayaan Utang Daerah) dan **selain APBD** (swasta/**KPBU**, BUMN, BUMD, Pemda lain, Belanja K/L, masyarakat, dan lainnya) *(Pasal 167 Ayat 2, 3, 4, 5 UU HKPD)*
- 3** Pemerintah Pusat dapat memberikan pengalokasian TKD dan dukungan pendanaan kepada pemda dalam hal Rencana Sinergi Pendanaan melibatkan Pembiayaan Utang Daerah dan/atau **KPBU** *(Pasal 168 UU HKPD)*
- 4** Pengalokasian TKD dan Dukungan Pendanaan untuk Sinergi Pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
 1. pencapaian prioritas nasional
 2. karakteristik wilayah.*(Pasal 168 UU HKPD)*



SUBSTANSI SINERGI PENDANAAN DALAM RPP HKFN

- ❑ Sinergi Pendanaan merupakan skema sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau daerah.
- ❑ Pemerintah daerah dapat melakukan Sinergi Pendanaan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah,
- ❑ Dukungan Pemerintah diberikan dalam hal terdapat Pembiayaan Utang Daerah (Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, Sukuk Daerah) dan/atau KPBU Pemda untuk mendapat tambahan alokasi TKD dan/atau dukungan pendanaan K/L

SINERGI PENDANAAN

WILAYAH TERTENTU

Lintas sektor dalam satu atau lebih daerah
(berbatasan/beririsan)
contoh: Pembangunan Daerah Tertinggal,
Daerah Perbatasan, dll.

TEMATIK TERTENTU

Tematik Pembangunan
(lintas bidang urusan pemerintahan)
contoh: Tematik Air Sanitasi dan Persampahan,
Tematik Pariwisata, Ketahanan Pangan, dll.

APBD :

- PAD
- TKD
- Penerimaan Pembiayaan Daerah

Selain APBD:

- Belanja K/L
- Swasta (/KPBU)
- BUMN, BUMD
- Pemda lain
- Masyarakat (obligasi/sukuk daerah) dan lainnya

Rencana Sinergi Pendanaan Peraturan Kepala Daerah

Kerangka strategik

Kerangka Acuan Kerja

Dukungan dari pihak-pihak

Pengelolaan keuangan program

Diajukan untuk mendapatkan dukungan pendanaan Pemerintah Pusat jika terdapat Pembiayaan Utang Daerah dan/atau KPBU

Dialokasikan TKD dan/atau Dukungan Pendanaan K/L

Memperhatikan

- Kemampuan Keuangan Negara
- Kapasitas Fiskal Daerah
- Prioritas Nasional
- Karakteristik Wilayah

Pusat
(Menkeu – Mendagri
Bappenas – K/L Terkait)

Berita Acara Kesepakatan





GAP PENDANAAN - INFRASTRUKTUR DAERAH

1. Kondisi Pemda I :

- ❖ Alokasi belanja infrastruktur rendah
- ❖ Kapasitas fiskal terbatas (di bawah rata-rata secara nasional)
- ❖ Capaian pembangunan infrastrukturnya juga rendah.

Rekomendasi :

- Penguatan belanja infrastruktur/Besaran alokasi
- Peningkatan kualitas penganggaran (perencanaan&tata kelola)

→ Terlihat dalam alokasi DAK Fisik:

- Rata-rata usulan kebutuhan DAK Pekerjaan Umum dan DAK Kesehatan yang disetujui oleh Kementerian/Lembaga (2021-2023) mencapai **Rp169 triliun**.
- Rata-rata alokasi DAK PU dan DAK Kesehatan hanya mencapai **Rp21,17 triliun** (12,5% dari kebutuhan).

2. Kondisi Pemda II :

- ❖ Alokasi belanja infrastruktur tinggi (di atas rata-rata secara nasional)
- ❖ Kapasitas fiskal relatif tinggi (di atas rata-rata secara nasional)
- ❖ Capaian pembangunan infrastrukturnya terbilang rendah.

Rekomendasi :

- Peningkatan kualitas penganggaran (perencanaan dan tata kelola)

SEKTOR KESEHATAN - LAYANAN KESEHATAN PRIMER

- Kebutuhan pendanaan 2020-2024 sekitar Rp371,3 triliun.
- Tahun 2023 target alokasi anggaran di daerah sebesar **Rp80,4 triliun**.
- Alokasi DAK Kesehatan + DAU Pelayanan Primer Kesehatan tahun 2023 hanya sebesar **Rp25,6 triliun dan Rp26 triliun**.
- Gap pembiayaan sebesar **Rp28,8 triliun**.

SEKTOR PENYEDIAAN AIR MINUM:

- Kebutuhan pendanaan untuk pembangunan baru, perluasan, dan pengelolaan SPAM pada tahun 2020-2024 mencapai **Rp109 triliun**.
- Sementara alokasi anggaran APBN hanya mencapai **Rp34,8 triliun** (32% dari kebutuhan).
- Gap pembiayaan mencapai **Rp74,12 triliun**.

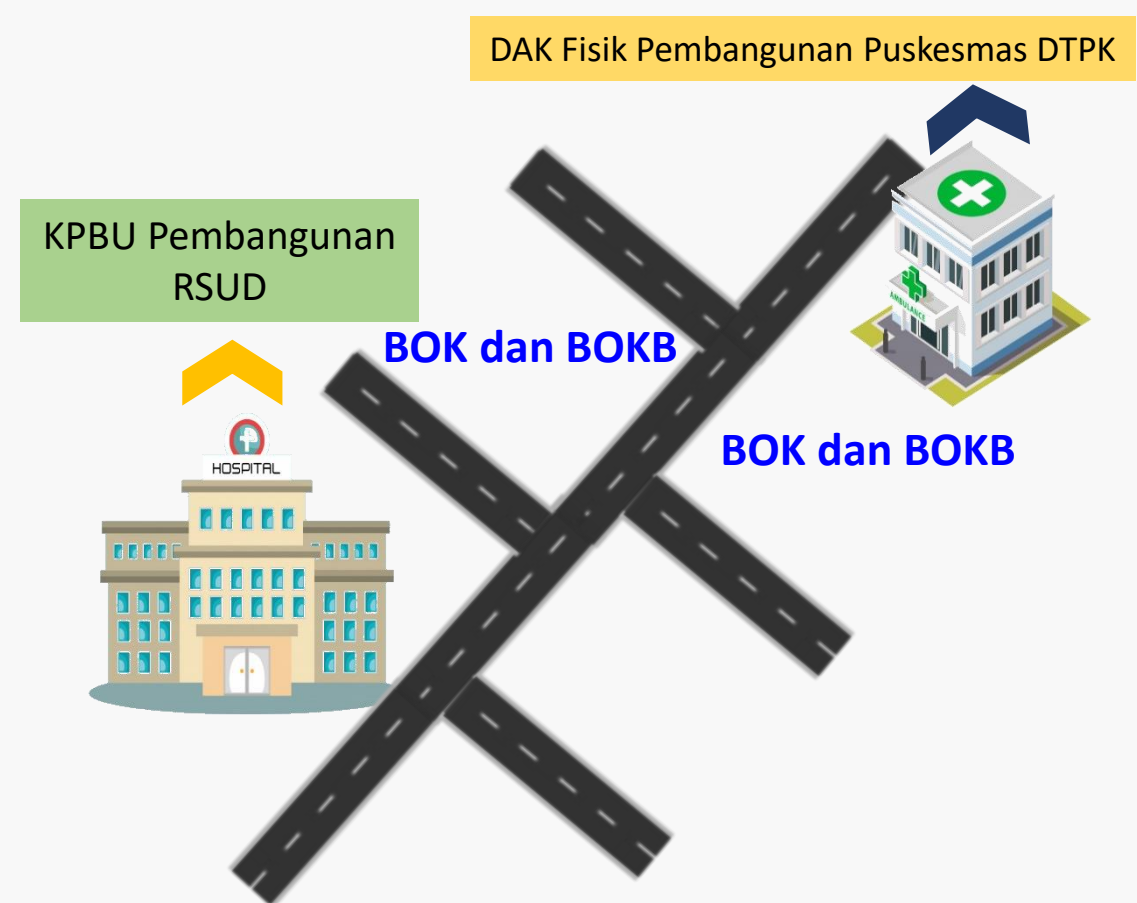
Sinergi Pendanaan Sektor : Pencapaian SPM Sektor tertentu

Tujuan : Mendorong Pemerintah Daerah mempunyai *Grand Design* Pembangunan di Daerahnya

Bidang Jalan : Mencapai SPM Kondisi Jalan "Baik"



Bidang Kesehatan : Mencapai SPM 100%



Sinergi Pendanaan Wilayah:
Sinergitas beberapa pendanaan kegiatan pada lokus tertentu.

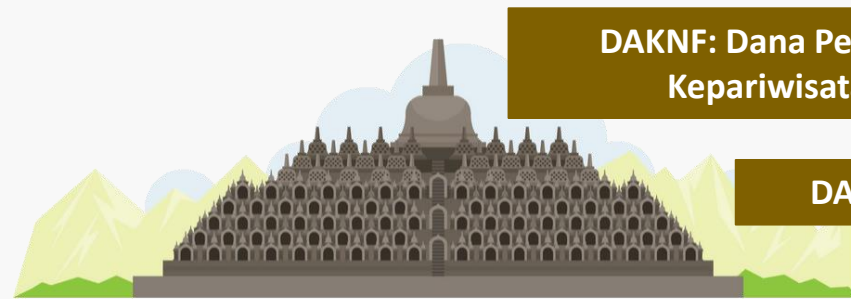
Tujuan : Mendorong Pemerintah Daerah mempunyai *Grand Design* Pembangunan di Daerahnya

Lokus Destinasi Pariwisata dan Sekitarnya

DAK Fisik: Pembangunan KSPN Borubudur DSKT

Hibah

Pinjaman : Pembangunan Pasar



**DAKNF: Dana Pelayanan
Kepariwisataaan**

DAKNF: BLPS



DAKNF: UKM

Pinjaman Sektor Jalan

CONTOH: Belum adanya Sinergi Pendanaan

Jenis Pendanaan Lebih dari 1 jenis dalam Bidang dan Kegiatan yang sama

Bidang Jalan

Kab. Kapuas

DAK Fisik (Rp54,1 Miliar)*¹

Ruas Jalan **Anjir Serapat – Palampai**, Mandomai – Mantangai, Mantangai - Timpah

Pinjaman (Rp610,0 Miliar)*²

Ruas Jalan **Anjir-Serampat-Palampai**, Jangkang - Sei Hanyo, Jembatan Ujung Murung, Pujon – Jangkang, Sei Hanyo - Tumbang Bukoi

*1) Berdasarkan data RK DAK Fisik TA 2020 tgl 3 Januari 2020

*2) Kontruksi dimulai TA 2020 & 2021 dengan tenor Pinjaman 5 Tahun

Kab. Kep. Yapen

DAK Fisik (Rp25,53 Miliar)*¹

Ruas Jalan **Saubeba – Poom**, Dawai - Pasir Panjang - Woda

Pinjaman (Rp250 Miliar)*²

Ruas Jalan Kamanap - Ansus, Mananayang - Sumberbaba, **Saubeba – Rosbori - Poom**, Jembatan Repapeip, Jembatan Sumboy

*1) Berdasarkan data RK DAK Fisik TA 2020 tgl 3 Januari 2020

*2) Kontruksi dimulai TA 2020 & 2021 dengan tenor Pinjaman 5 Tahun

Kab. Sorong

DAK Fisik (Rp52,40 Miliar)*¹

Ruas Jalan Ring Road Aimas Km 18 **Aimas - Unipa - Klamono – Klabra**, Jalan Intimpura Pasar Aimas - Jalan Petrochina

Pinjaman (Rp257,12 Miliar)*²

Aimas - Mariat Pantai – Mariyai, **Aimas – Unipa**, Canal Aimas - Pantai Mariat, Intimpura - Pasar Aimas, Kantor Pemda - Jalan Canal, Klamono – Segun, Klasari – Wonosobo, Lingkungan Malawele, Majener - Jalan Petrochina, Majener - Katapop Pantai, Malawor – Batulubang, Malawor – Makbon, Petrochina II (Smk 1), Pos 17 - Kurnia

*1) Berdasarkan data RK DAK Fisik TA 2020 tgl 3 Januari 2020

*2) Kontruksi dimulai TA 2019 & 2020 dengan tenor Pinjaman 4 Tahun

Jenis Pendanaan Lebih dari 1 jenis dalam Bidang yang sama dengan Kegiatan yang Berbeda

Bidang Kesehatan

Kab. Donggala

DAK Fisik (Rp12,61 Miliar)*¹

Kegiatan : **Pengadaan Alat Kesehatan**

Lokus: **RSUD Kabelota**

Pinjaman (Rp161,95 Miliar)*²

Kegiatan : **Pembangunan/Rehab**

Lokus: **RSUD Kabelota**

*1) Berdasarkan data RK DAK Fisik TA 2020 tgl 3 Januari 2020

*2) Kontruksi dimulai TA 2021 & 2022 dengan tenor Pinjaman 5 Tahun

Jenis Pendanaan Lebih dari 1 jenis dalam Bidang dan Kegiatan yang berbeda

Kab. Kapuas

Lokus : **Desa Bangun Harjo, Desa Tamban Luar**

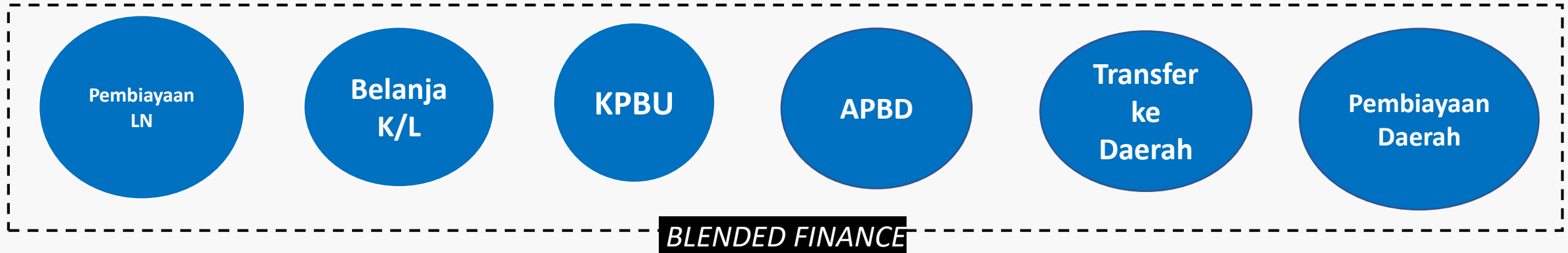
- **DAK Fisik** Bidang Pertanian
- **Pinjaman** Bidang Jalan

Lokus : **Desa Jangkang, Desa Selat Dalam**

- **DAK Fisik** Bidang Sanitasi
- **Pinjaman** Bidang Jalan

• **Hibah** Bidang Air Minum? *untuk Hibah data yang tersedia hanya data Kab/Kota

PERBANDINGAN BLENDED FINANCE DENGAN SINERGI PENDANAAN



Key Point : *Sinergi Pendanaan merupakan skema penyempurnaan Blended Finance untuk diterapkan dalam keuangan daerah yang membuka opsi insentif berupa alokasi TKD dan/atau dukungan pendanaan Belanja K/L dalam hal terdapat Pembiayaan Utang Daerah dan/atau KPBU dalam Rencana Sinergi Pendanaan.*



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Terima kasih

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan

Jl. Wahidin Raya 1, Gedung Djuanda 1

Jakarta Pusat

